

MELAMPAUI PENGAWASAN FORMAL: SUPREMASI ETIKA KARYAWAN DALAM PENCEGAHAN KECURANGAN SUB SEKTOR MAKANAN DAN MINUMAN INDONESIA

Muhammad Hazwin Idris¹, Muhamad Muslih^{2*}

¹Akuntansi, Fakultas Ekonomi & Bisnis, Universitas Telkom Indonesia,
hazwinidriiss@student.telkomuniversity.ac.id

²Akuntansi, Fakultas Ekonomi & Bisnis, Universitas Telkom Indonesia,
muhamadmuslih@telkomuniversity.ac.id

ABSTRAK

Fraud masih menjadi risiko tata kelola yang nyata bagi perusahaan publik, termasuk perusahaan sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), karena keterlambatan dan pelanggaran pelaporan keuangan masih ditemukan meskipun regulasi keterbukaan informasi telah diperkuat oleh OJK. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh frekuensi rapat komite audit, etika karyawan, whistleblowing system, dan teknologi informasi terhadap pencegahan fraud pada perusahaan sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI periode 2020-2024. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data sekunder berupa laporan tahunan perusahaan. Sampel ditentukan melalui teknik purposive sampling sehingga diperoleh 29 perusahaan dengan 145 observasi selama lima tahun pengamatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa frekuensi rapat komite audit, etika karyawan, whistleblowing system, dan teknologi informasi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pencegahan fraud, dengan nilai Adjusted R-squared sebesar 83,48%. Namun secara parsial, hanya etika karyawan yang terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan fraud, sedangkan frekuensi rapat komite audit, whistleblowing system, dan teknologi informasi secara parsial tidak berpengaruh signifikan. Temuan ini mengindikasikan bahwa pencegahan fraud lebih ditentukan oleh kekuatan integritas individu dibandingkan aspek kuantitas mekanisme pengawasan formal semata, sehingga perusahaan disarankan membangun pendekatan pencegahan fraud yang terintegrasi antara penguatan etika karyawan, kualitas substansi pengawasan, keandalan sistem pelaporan, dan optimalisasi teknologi informasi.

Kata kunci: *rapat komite audit, etika karyawan, whistleblowing system, teknologi informasi, pencegahan fraud*

ABSTRACT

Fraud remains a real governance risk for public companies, including food and beverage sub-sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX), as delays and violations in financial reporting are still found despite stronger disclosure regulations issued by the Financial Services Authority (OJK). This study aims to examine the effect of audit committee meeting frequency, employee ethics, whistleblowing system, and information technology on fraud prevention in food and beverage sub-sector companies listed on the IDX for the 2020-2024 period. This study uses a quantitative approach with secondary data from company annual reports. The sample was determined through purposive sampling, resulting in 29 companies with 145 observations over five years. The results show that audit committee meeting frequency, employee ethics, whistleblowing system, and information technology simultaneously have a significant effect on fraud prevention, with an Adjusted R-squared of 83.48%. Partially, however, only employee ethics has a positive and significant effect on fraud prevention, while audit committee

meeting frequency, whistleblowing system, and information technology have no significant partial effect. These findings indicate that fraud prevention is determined more by the strength of individual integrity than by the quantity of formal oversight mechanisms alone, so companies are advised to build an integrated fraud-prevention approach that combines strengthening employee ethics, the substantive quality of oversight, the reliability of reporting systems, and the optimization of information technology.

Keywords: *audit committee meeting, employee ethics, whistleblowing system, information technology, fraud prevention*

PENDAHULUAN

Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) memiliki kewajiban keterbukaan informasi melalui laporan keuangan berkala, laporan tahunan, serta pengumuman keterbukaan informasi, sebagaimana diatur dalam UU No. 8 Tahun 1995 dan diperkuat melalui POJK 31/POJK.04/2015, POJK 14/POJK.04/2022, serta POJK 29/POJK.04/2016 (UU Nomor 8 Tahun 1995, 1995; Komisioner & Jasa, 2015; Otoritas Jasa Keuangan, 2022). Penelitian ini memfokuskan objek pada sub sektor makanan dan minuman karena aktivitas usahanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar dengan permintaan yang relatif stabil, menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, dan menopang konsumsi rumah tangga yang berkontribusi 54,04% terhadap PDB pada tahun 2024 (IDX Industrial Classification, 2021; Investor.id, 2025). Selama periode 2020-2024, jumlah perusahaan pada sub sektor ini terus bertambah, sehingga persaingan antarperusahaan semakin ketat dan menuntut penguatan tata kelola, termasuk mekanisme pencegahan fraud.

Praktik fraud tetap menjadi tantangan serius bagi perusahaan publik karena berdampak pada kerugian finansial dan menurunkan kepercayaan investor (PwC, 2022). Survei PwC (2022) mencatat 51% organisasi global mengalami fraud dalam dua tahun terakhir, sementara laporan AFCE (2025) menunjukkan sebagian besar kasus fraud melibatkan pihak internal melalui penyalahgunaan aset dan manipulasi laporan keuangan. Penelitian ini menggunakan Fraud Triangle Theory sebagai landasan utama untuk menjelaskan mekanisme terjadinya fraud, yang muncul

dari interaksi tekanan (pressure), peluang (opportunity), dan rasionalisasi (rationalization) (Cressey, 1953). Aspek peluang relatif dapat dikendalikan melalui sistem monitoring dan pengendalian internal yang efektif, sedangkan rasionalisasi dapat ditekan melalui budaya etis dan penegakan aturan yang konsisten (COSO & AFCE, 2023). Guna memperdalam sisi perilaku individu di balik proses rasionalisasi tersebut, penelitian ini juga menggunakan Stewardship Theory (Donaldson & Davis, 1991), yang memandang karyawan sebagai steward yang cenderung bertindak untuk kepentingan organisasi atas dasar kepercayaan dan tanggung jawab intrinsik, bukan semata karena pengawasan eksternal, sehingga kedua teori ini saling melengkapi dalam menjelaskan sisi mekanisme struktural maupun sisi perilaku individu dari fraud.

Fenomena di Indonesia masih menunjukkan persoalan kepatuhan pelaporan. Sepanjang 2022, OJK dilaporkan telah mengenakan sanksi kepada 276 emiten dengan akumulasi denda sekitar Rp34 miliar akibat keterlambatan dan pelanggaran pelaporan (Otoritas Jasa Keuangan, 2022), yang mencerminkan bahwa mekanisme monitoring, pengendalian internal, dan tata kelola pelaporan belum sepenuhnya berjalan efektif sehingga membuka peluang terjadinya fraud (Algrady et al., 2025). Komite audit memegang peran penting melalui fungsi pengawasan atas pelaporan keuangan dan pengendalian internal (Daffa et al., 2023), dan rapat komite audit menjadi forum utama pembahasan temuan audit serta risiko yang muncul. POJK Nomor 55/POJK.04/2015 mewajibkan komite

audit mengadakan rapat sekurang-kurangnya sekali dalam tiga bulan, namun dalam praktiknya rapat tidak selalu berjalan efektif dan sering hanya memenuhi kewajiban formal (Daffa et al., 2023; Prastyawati et al., 2025).

Selain aspek struktural, faktor perilaku individu sebagaimana dijelaskan melalui Stewardship Theory turut memengaruhi terjadinya fraud, sehingga etika karyawan yang tumbuh dari kepercayaan dan tanggung jawab intrinsik tersebut menjadi elemen penting dalam membentuk toleransi organisasi terhadap penyimpangan. Whistleblowing system juga berperan sebagai kanal deteksi dini karena membuka jalur pelaporan penyimpangan yang tidak selalu terlihat melalui pengawasan formal (Periansya et al., 2023), sementara pemanfaatan teknologi informasi diyakini memperkuat pengendalian internal melalui integrasi data, jejak audit, dan transparansi proses (Chang et al., 2024; Gkegkas et al., 2025). Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh frekuensi rapat komite audit, etika karyawan, whistleblowing system, dan teknologi informasi, baik secara simultan maupun parsial, terhadap pencegahan fraud pada perusahaan sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI periode 2020-2024, sekaligus menjawab kesenjangan hasil penelitian terdahulu yang belum menunjukkan konsistensi arah pengaruh pada masing-masing variabel tersebut (McLaughlin et al., 2021; Mardessi, 2021; Attia et al., 2025).

KAJIAN LITERATUR

Fraud Triangle Theory

Fraud Triangle Theory yang diperkenalkan oleh Cressey (1953) menjelaskan bahwa fraud terjadi karena interaksi tiga faktor, yaitu pressure, opportunity, dan rationalization. Elemen pressure merujuk pada dorongan yang membuat individu mempertimbangkan tindakan menyimpang, misalnya tekanan finansial atau target kinerja. Elemen opportunity menjelaskan bahwa fraud terjadi ketika terdapat kelemahan pengendalian dan asimetri informasi yang memungkinkan penyimpangan dilakukan dan disembunyikan (Shen et al., 2025). Elemen

rationalization menggambarkan proses pembenaran internal pelaku, yang berfungsi sebagai jalur psikologis yang menghubungkan tekanan dengan niat melakukan fraud (Nyoman et al., 2023). Kerangka ini tetap relevan sebagai model dasar untuk memetakan variabel penelitian, meskipun kompleksitas fraud modern turut melibatkan faktor sistemik lain (Roffia & Poffo, 2025).

Stewardship Theory

Stewardship Theory (Donaldson & Davis, 1991) menjelaskan bahwa karyawan pada dasarnya dapat bertindak sebagai steward yang mengutamakan kepentingan organisasi secara keseluruhan, didorong oleh kepercayaan, motivasi intrinsik, dan rasa tanggung jawab, bukan semata karena diawasi. Prinsip utama teori ini menekankan bahwa hubungan antara individu dan organisasi dibangun atas dasar kepercayaan kolektif dan kolaborasi, sehingga perilaku etis dapat tumbuh secara alami tanpa bergantung pada kontrol eksternal yang ketat (Jide et al., 2025). Perspektif ini banyak diterapkan dalam kajian kontemporer untuk menjelaskan perilaku etis individu di berbagai konteks organisasi, termasuk kepemimpinan etis dan integritas dalam pengelolaan risiko (Amanda & Kesuma, 2025).

Rapat Komite Audit

Frekuensi rapat komite audit sering digunakan sebagai indikator audit committee activity yang merefleksikan intensitas fungsi pengawasan (McLaughlin et al., 2021). Kusumosari & Rahardjo (2023) menemukan jumlah rapat komite audit berpengaruh negatif dan signifikan terhadap financial statement fraud, namun Mardessi (2021) dan Attia et al. (2025) menunjukkan bahwa pengaruh frekuensi rapat tidak selalu signifikan atau bersifat linear, sehingga efektivitasnya tetap dipengaruhi kualitas agenda, independensi, dan kompetensi anggota.

Etika Karyawan

Etika karyawan merupakan prinsip moral dan standar perilaku individu dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Penguatan ethical culture berperan memitigasi risiko fraud karena melemahkan

pembenaran perilaku menyimpang (Ratmono & Frendy, 2022), sementara budaya etika organisasi juga berkaitan dengan pencegahan fraud melalui perilaku whistleblowing (Tripermata et al., 2022).

Whistleblowing System

Whistleblowing system merupakan sistem pelaporan yang menyediakan saluran bagi individu untuk melaporkan pelanggaran atau perilaku tidak etis. Berdasarkan data ACFE, sekitar 42% kasus fraud terdeteksi melalui laporan whistleblower, jauh lebih tinggi dibandingkan audit internal, sehingga menunjukkan pentingnya budaya keterbukaan (Akhyar et al., 2022). Efektivitasnya akan lebih kuat ketika peran, tanggung jawab, dan alur tindak lanjut jelas dalam tata kelola risiko organisasi (Kagias et al., 2024).

Teknologi Informasi

Teknologi informasi membantu perusahaan membangun proses yang lebih tertib dan terlacak melalui pencatatan transaksi, pembatasan akses, dan jejak audit. Transformasi digital menunjukkan efek penghambatan terhadap corporate violations (Chang et al., 2024), sementara pemanfaatan data analytics semakin banyak digunakan dalam deteksi dan pencegahan financial statement fraud (Gkegkas et al., 2025).

Penelitian Terdahulu

Sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang belum konsisten mengenai hubungan antarvariabel dalam penelitian ini. Girau et al. (2024) menemukan kebijakan whistleblowing terbukti berkaitan signifikan dengan kemungkinan terjadinya corporate fraud di Malaysia, sedangkan Masud et al. (2024) menemukan komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja pengungkapan ESG. Shanikat & Aldabbas (2025) menunjukkan jumlah rapat komite audit berkaitan dengan mitigasi risiko fraud pelaporan keuangan, sementara Nindito et al. (2020) menemukan corporate governance tidak berkontribusi besar dalam mencegah fraud tanpa dukungan elemen lain.

Kerangka Berpikir dan Hipotesis Penelitian

Pencegahan fraud dipandang sebagai langkah proaktif perusahaan yang dipengaruhi oleh efektivitas fungsi pengawasan, kekuatan budaya etika, keberadaan mekanisme pelaporan yang dapat dipercaya, serta dukungan teknologi informasi. Frekuensi rapat komite audit diposisikan sebagai indikator aktivitas pengawasan yang secara konseptual diharapkan meningkatkan pencegahan fraud, karena rapat yang lebih rutin memperbesar peluang pembahasan risiko dan percepatan tindak lanjut (Shanikat & Aldabbas, 2025). Etika karyawan diposisikan sebagai faktor yang memperkecil toleransi terhadap penyimpangan dan mendorong perilaku bertanggung jawab (Ratmono & Frendy, 2022). Whistleblowing system diposisikan sebagai faktor yang memperbesar peluang deteksi dini dan memperkuat akuntabilitas melalui tindak lanjut yang terstruktur (Kagias et al., 2024). Teknologi informasi diposisikan sebagai faktor yang memperkuat kontrol, mempercepat identifikasi masalah, dan membuat penyimpangan lebih sulit disembunyikan (Gkegkas et al., 2025). Berdasarkan kerangka tersebut, hipotesis penelitian dirumuskan sebagai berikut.

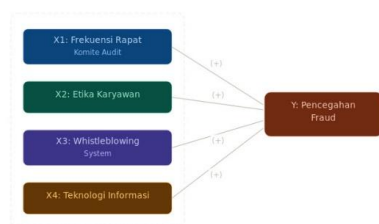
H0: Frekuensi rapat komite audit, etika karyawan, whistleblowing system, dan teknologi informasi secara simultan berpengaruh terhadap pencegahan fraud pada perusahaan sub sektor makanan dan minuman di BEI tahun 2020-2024.

H1: Frekuensi rapat komite audit berpengaruh positif terhadap pencegahan fraud.

H2: Etika karyawan berpengaruh positif terhadap pencegahan fraud.

H3: Whistleblowing system berpengaruh positif terhadap pencegahan fraud.

H4: Teknologi informasi berpengaruh positif terhadap pencegahan fraud.



Gambar 1. Kerangka Berpikir

Sumber: Data diolah oleh penulis (2026)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis riset data sekunder untuk menguji pengaruh frekuensi rapat komite audit, etika karyawan, whistleblowing system, dan teknologi informasi terhadap pencegahan fraud (Creswell, 2018). Analisis menggunakan regresi data panel karena data yang digunakan merupakan gabungan data time series periode 2020-2024 dan data cross section dari perusahaan sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI, sehingga mampu menangkap variasi antarperusahaan sekaligus variasi antarwaktu (Gujarati & Porter, 2009; Wooldridge, 2010). Keterlibatan peneliti bersifat non-intervensi karena data diperoleh dari laporan tahunan perusahaan yang telah dipublikasikan secara resmi.

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah pencegahan fraud, yang diukur melalui indikator pengungkapan mekanisme pencegahan fraud dalam laporan tahunan (Sudarmanto & Utami, 2021). Variabel independen terdiri atas rapat komite audit (jumlah rapat komite audit dalam satu tahun), etika karyawan (rasio skor pengungkapan etika terhadap skor maksimum), whistleblowing system (rasio item yang diungkapkan terhadap item menurut pedoman KNKG), dan teknologi informasi (rasio intangible asset software terhadap total aset). Ringkasan operasional variabel disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1.

Operasional Variabel Penelitian

Variabel	Indikator/Pengukuran	Skala
Pencegahan Fraud (Y)	Indeks pengungkapan indikator pencegahan fraud pada laporan tahunan (1 jika ada, 0 jika tidak ada).	Dummy
Rapat Komite Audit (X1)	Jumlah rapat komite audit dalam satu tahun.	Rasio
Etika Karyawan (X2)	Total skor item yang diungkapkan / Skor maksimum.	Rasio
Whistleblowing System (X3)	Jumlah item yang diungkapkan / Jumlah item menurut KNKG.	Rasio
Teknologi Informasi (X4)	Intangible asset software / Total asset.	Rasio

Sumber: Data diolah penulis (2026)

Populasi penelitian ini adalah seluruh perusahaan sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI selama periode 2020-2024. Sampel ditentukan melalui teknik purposive sampling dengan kriteria: (1) terdaftar di BEI selama periode 2020-2024; (2) konsisten melampirkan laporan tahunan secara lengkap; (3) menerapkan kebijakan anti-fraud; dan (4) memuat data variabel penelitian secara lengkap. Proses seleksi sampel menghasilkan 29 perusahaan dengan 145 observasi (29 perusahaan x 5 tahun), sebagaimana disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2.

Penentuan Sampel Penelitian

No	Kriteria Sampel	Jumlah
1	Perusahaan sub sektor makanan dan minuman terdaftar di BEI periode 2020-2024	102
2	Tidak konsisten melampirkan laporan tahunan secara lengkap	(16)
3	Tidak menerapkan kebijakan anti-fraud	(45)
4	Data variabel penelitian tidak lengkap	(12)
5	Jumlah sampel memenuhi kriteria	29
6	Jumlah observasi (29 perusahaan x 5 tahun)	145

Sumber: Data diolah penulis (2026)

Data dikumpulkan menggunakan teknik studi pustaka dan dokumentasi atas laporan tahunan perusahaan yang dipublikasikan

melalui situs resmi BEI maupun situs web perusahaan. Teknik analisis data menggunakan regresi data panel dengan model: $Y_{it} = a + b_1X_{1it} + b_2X_{2it} + b_3X_{3it} + b_4X_{4it} + e_{it}$, dengan Y_{it} adalah pencegahan fraud, X_{1it} hingga X_{4it} adalah rapat komite audit, etika karyawan, whistleblowing system, dan teknologi informasi pada perusahaan i periode t . Pemilihan model estimasi (Common Effect Model, Fixed Effect Model, atau Random Effect Model) dilakukan melalui Uji Chow dan Uji Hausman, dengan kriteria nilai probabilitas $< 0,05$ mengarah pada Fixed Effect Model. Pengujian hipotesis dilakukan melalui Uji Koefisien Determinasi (R^2), Uji F (simultan), dan Uji t (parsial) pada taraf signifikansi 5%.

PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

Hasil analisis statistik deskriptif atas 145 observasi dari 29 perusahaan sampel selama periode 2020-2024 ditampilkan pada Tabel 3.

Tabel 3.

Hasil Statistik Deskriptif

	PF	RKA	EK	WBS	TI
Mean	0,7862	6,3103	0,7257	0,8786	0,0121
Median	1,0000	5,0000	0,7407	0,9000	0,0022
Maximum	1,0000	43,0000	0,8704	1,0000	0,1295
Minimum	0,0000	0,0000	0,5741	0,4000	0,0000
Std. Dev.	0,4114	5,6415	0,0782	0,1435	0,0261

Keterangan: PF = Pencegahan Fraud; RKA = Rapat Komite Audit; EK = Etika Karyawan; WBS = Whistleblowing System; TI = Teknologi Informasi. Sumber: Data diolah (2026)

Rapat Komite Audit memiliki rata-rata 6,3103 dengan standar deviasi 5,6415, yang mengindikasikan frekuensi rapat cukup heterogen antarperusahaan, dengan nilai maksimum 43 rapat dan minimum 0 (tidak ada rapat). Sebaran ini bermakna bahwa kematangan tata kelola antarperusahaan sampel masih timpang: sebagian perusahaan telah menjadikan rapat komite audit sebagai forum pengawasan rutin yang intensif, sementara sebagian lain bahkan tidak menyelenggarakan rapat sama sekali

sepanjang tahun, yang mengindikasikan adanya perusahaan yang berpotensi hanya memenuhi ketentuan formal keberadaan komite audit tanpa menjalankan fungsi pengawasannya secara substantif.

Etika Karyawan memiliki rata-rata 0,7257 dengan standar deviasi kecil (0,0782) sehingga tergolong homogen antarperusahaan. Homogenitas ini mengindikasikan bahwa pengungkapan kebijakan dan program etika telah menjadi praktik yang relatif merata di industri, kemungkinan besar didorong oleh tekanan institusional dan ekspektasi pemangku kepentingan yang serupa pada perusahaan-perusahaan sejenis, sehingga variasi antarperusahaan pada variabel ini lebih ditentukan oleh kualitas implementasi dibandingkan ada-tidaknya kebijakan itu sendiri.

Whistleblowing System memiliki rata-rata 0,8786 dengan standar deviasi 0,1435, yang menunjukkan bahwa mayoritas perusahaan sampel telah mengadopsi sebagian besar item pengungkapan whistleblowing system sesuai pedoman KNKG, namun variasi yang masih ada mengindikasikan bahwa kelengkapan pengungkapan sistem pelaporan belum sepenuhnya seragam, khususnya pada aspek jaminan perlindungan pelapor dan mekanisme tindak lanjut. Teknologi Informasi memiliki rata-rata rendah 0,0121 dengan standar deviasi 0,0261 yang mengindikasikan tingkat pemanfaatan teknologi informasi masih heterogen dan relatif rendah antarperusahaan. Rendahnya rata-rata ini bermakna bahwa investasi pada aset tidak berwujud berbasis software di industri makanan dan minuman secara umum masih terbatas, sehingga sebagian besar perusahaan sampel berpotensi belum menjadikan teknologi sebagai tumpuan utama dalam mendukung fungsi pengendalian dan pencegahan fraud.

Pencegahan Fraud sebagai variabel dependen memiliki rata-rata 0,7862, yang menunjukkan sebagian besar perusahaan sampel telah menerapkan mekanisme pencegahan fraud. Nilai rata-rata yang cukup tinggi ini mengindikasikan bahwa secara umum kesadaran perusahaan sub sektor makanan dan minuman terhadap

pentingnya pencegahan fraud sudah relatif baik, meskipun demikian keberadaan pengungkapan tersebut belum tentu mencerminkan efektivitas implementasinya di lapangan, sehingga pengujian pengaruh variabel-variabel independen menjadi penting untuk mengidentifikasi mekanisme mana yang benar-benar berkontribusi terhadap pencapaian tersebut.

Pemilihan Model Regresi Data Panel

Uji Chow digunakan untuk memilih antara Common Effect Model (CEM) dan Fixed Effect Model (FEM). Hasil uji menunjukkan nilai probabilitas cross-section F dan Chi-square sebesar 0,0000 ($< 0,05$), sehingga model yang dipilih adalah Fixed Effect Model. Uji Hausman selanjutnya digunakan untuk memilih antara FEM dan Random Effect Model (REM), dengan hasil nilai probabilitas Chi-square sebesar 0,0000 ($< 0,05$), sehingga model yang dipilih tetap Fixed Effect Model. Ringkasan hasil kedua uji tersebut disajikan pada Tabel 4.

Tabel 4.

Hasil Uji Chow dan Uji Hausman

Pengujian	Statistik Uji	df	Prob.	Model Terpilih
Chow (Cross-section F)	24,283685	(28,112)	0,0000	Fixed Effect
Chow (Cross-section Chi-sq.)	283,618661	28	0,0000	Fixed Effect
Hausman (Cross-section random)	35,283676	4	0,0000	Fixed Effect

Sumber: Data diolah (2026)

Terpilihnya Fixed Effect Model pada kedua pengujian ini secara substantif bermakna bahwa terdapat karakteristik unik pada masing-masing perusahaan sampel, seperti perbedaan budaya organisasi, struktur kepemilikan, atau kematangan tata kelola, yang bersifat tetap sepanjang waktu dan turut memengaruhi tingkat pencegahan fraud, namun tidak berkorelasi secara acak dengan variabel independen. Dengan kata lain, perbedaan antarperusahaan dalam penelitian ini bukan sekadar variasi acak,

melainkan mencerminkan perbedaan mendasar pada karakteristik masing-masing entitas yang perlu diperhitungkan agar estimasi pengaruh variabel independen tidak bias.

Persamaan Regresi Data Panel

Berdasarkan Uji Chow dan Uji Hausman, model yang digunakan dalam penelitian ini adalah Fixed Effect Model. Hasil estimasi regresi data panel disajikan pada Tabel 5.

Tabel 5.

Hasil Regresi Data Panel (Fixed Effect Model)

Variabel	Koefisien	Std. Error	t-Statistik	Prob.
C	-18,72428	3,206313	-5,839815	0,0000
RKA	-0,000461	0,005117	-0,090109	0,9284
EK	27,01305	4,414373	6,119340	0,0000
WBS	0,059653	0,114087	0,522868	0,6021
TI	0,267283	1,110633	0,240658	0,8103

$R\text{-squared} = 0,871504$; $Adjusted\ R\text{-squared} = 0,834791$; $F\text{-statistic} = 23,73824$; $Prob(F\text{-statistic}) = 0,000000$. Sumber: Data diolah (2026)

Persamaan regresi yang diperoleh adalah: $PF = -18,72428 - 0,000461\ RKA + 27,01305\ EK + 0,059653\ WBS + 0,267283\ TI$. Nilai konstanta -18,72428 menunjukkan nilai PF apabila seluruh variabel independen bernilai nol, sebuah kondisi ekstrem yang secara empiris jarang terjadi namun secara matematis menegaskan bahwa tanpa dukungan keempat mekanisme tersebut, tingkat pencegahan fraud diperkirakan berada jauh di bawah titik netral. Koefisien RKA bernilai negatif dan sangat kecil, yang mengindikasikan bahwa penambahan satu kali rapat komite audit secara marjinal justru berasosiasi dengan penurunan skor pencegahan fraud, meskipun besarannya dapat diabaikan secara praktis. Koefisien EK bernilai positif dan jauh lebih besar dibandingkan variabel lain, menunjukkan bahwa peningkatan satu satuan skor etika karyawan berasosiasi dengan kenaikan skor pencegahan fraud yang jauh lebih besar dibandingkan kenaikan proporsional pada variabel lain. Koefisien WBS dan TI bernilai positif namun kecil, yang mengindikasikan arah pengaruh yang sesuai ekspektasi teori meskipun besarannya masih terbatas,

sehingga signifikansi statistiknya perlu dikonfirmasi lebih lanjut melalui uji t.

Pengujian Hipotesis

Nilai Adjusted R-squared sebesar 0,834791 menunjukkan bahwa variabel RKA, EK, WBS, dan TI mampu menjelaskan 83,48% variasi pencegahan fraud, sedangkan sisanya sebesar 16,52% dijelaskan oleh faktor lain di luar model. Besaran daya jelas ini tergolong sangat tinggi untuk penelitian ilmu sosial, yang mengindikasikan bahwa keempat mekanisme yang diuji dalam penelitian ini secara kolektif merupakan determinan utama pencegahan fraud pada industri ini, sehingga faktor-faktor lain di luar model relatif memiliki peran yang lebih kecil. Hasil uji F menunjukkan nilai probabilitas F-statistic sebesar 0,000000 ($< 0,05$), sehingga H_0 diterima, yang berarti keempat variabel independen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pencegahan fraud.

Hasil uji t menunjukkan bahwa RKA memiliki nilai probabilitas 0,9284 ($> 0,05$) sehingga H_1 ditolak dan RKA tidak berpengaruh signifikan terhadap pencegahan fraud. EK memiliki nilai probabilitas 0,0000 ($< 0,05$) dengan koefisien positif sehingga H_2 diterima dan EK berpengaruh positif signifikan terhadap pencegahan fraud. WBS memiliki nilai probabilitas 0,6021 ($> 0,05$) sehingga H_3 ditolak, dan TI memiliki nilai probabilitas 0,8103 ($> 0,05$) sehingga H_4 juga ditolak. Pola hasil ini secara keseluruhan bermakna bahwa daya jelas model yang tinggi terutama ditopang oleh satu variabel dominan, yaitu etika karyawan, sementara ketiga variabel lain memberikan kontribusi yang jauh lebih kecil secara individual meskipun tetap relevan ketika bekerja bersama-sama dalam satu sistem pengendalian. Ringkasan hasil pengujian hipotesis disajikan pada Tabel 6.

Tabel 6.

Ringkasan Hasil Pengujian Hipotesis

Hipotesis	Prob.	Keterangan
$H_1: RKA \rightarrow PF$	0,9284	Ditolak (tidak signifikan)

Hipotesis	Prob.	Keterangan
$H_2: EK \rightarrow PF$	0,0000	Diterima (positif signifikan)
$H_3: WBS \rightarrow PF$	0,6021	Ditolak (tidak signifikan)
$H_4: TI \rightarrow PF$	0,8103	Ditolak (tidak signifikan)
$H_0: RKA, EK, WBS, TI \rightarrow PF$ (simultan)	0,0000	Diterima (signifikan)

Sumber: Data diolah (2026)

Pengaruh Rapat Komite Audit terhadap Pencegahan Fraud

Rapat komite audit secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap pencegahan fraud (prob. 0,9284 $> 0,05$). Temuan ini menunjukkan bahwa ukuran kuantitas rapat hanya menggambarkan sisi formalitas kegiatan, bukan kedalaman substansi pembahasan seperti evaluasi pengendalian internal dan penelaahan risiko kecurangan. Implikasinya, perusahaan yang hanya mengejar pemenuhan jumlah minimum rapat sesuai ketentuan POJK berisiko keliru menganggap kewajiban tata kelola telah terpenuhi secara substantif, padahal tanpa kualitas pembahasan yang memadai, forum rapat tersebut tidak memberikan nilai tambah nyata terhadap upaya pencegahan fraud. Efektivitas komite audit juga sangat bergantung pada kapabilitas, independensi, dan keahlian anggotanya di bidang akuntansi dan keuangan, yang tidak sepenuhnya tercermin dari jumlah pertemuan. Selain itu, keputusan pencegahan fraud umumnya merupakan hasil kolaborasi lintas fungsi, bukan hanya forum komite audit semata, sehingga hasil penelitian ini tidak sejalan dengan hipotesis awal namun konsisten dengan temuan bahwa kualitas substansi rapat dan independensi anggota lebih menentukan dibandingkan sekadar frekuensi pertemuan (Ghozali, 2018; Mardessi, 2021).

Pengaruh Etika Karyawan terhadap Pencegahan Fraud

Kekuatan pengaruh Etika Karyawan terhadap Pencegahan Fraud dapat dibuktikan lebih lanjut melalui perbandingan nilai t-statistik dan koefisien regresi antarvariabel pada Tabel 6. Nilai t-

statistik Etika Karyawan sebesar 6,119340 tidak hanya melampaui nilai kritis pada tingkat signifikansi 5% ($\pm 1,96$), tetapi juga merupakan nilai t-statistik tertinggi di antara seluruh variabel independen dalam penelitian ini, jauh melampaui Rapat Komite Audit (-0,090109), Whistleblowing System (0,522868), maupun Teknologi Informasi (0,240658). Hal ini menegaskan bahwa pengaruh Etika Karyawan terhadap pencegahan fraud bersifat kuat dan konsisten, bukan sekadar signifikan secara statistik. Bukti ini semakin diperkuat oleh besarnya nilai koefisien regresi Etika Karyawan sebesar 27,01305, yang jauh melampaui koefisien Rapat Komite Audit (-0,000461), Whistleblowing System (0,059653), maupun Teknologi Informasi (0,267283). Perbandingan ini menunjukkan bahwa Etika Karyawan tidak hanya menjadi satu-satunya variabel yang signifikan secara statistik, tetapi juga memberikan kontribusi pengaruh yang jauh lebih besar secara ekonomis dibandingkan ketiga variabel lainnya, sehingga peningkatan pada tingkat etika karyawan berdampak jauh lebih besar terhadap pencegahan fraud dibandingkan penguatan pada mekanisme pengendalian formal lainnya.

Pengaruh Whistleblowing System terhadap Pencegahan Fraud

Whistleblowing system secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap pencegahan fraud (prob. 0,6021 > 0,05). Pola ini juga tampak secara deskriptif: perusahaan dengan tingkat penerapan whistleblowing system di atas rata-rata ($> 0,802145594$) tercatat mengalami fraud sebesar 60,69%, sementara hanya 6,90% yang tidak mengalami fraud, sedangkan pada kelompok di bawah rata-rata ($< 0,802145594$) seluruh perusahaan dalam kelompok tersebut (32,41% dari total sampel) justru mengalami fraud tanpa terkecuali, sehingga penerapan whistleblowing system yang tinggi sekalipun tidak serta-merta menurunkan kejadian fraud. Hasil ini mengindikasikan bahwa efektivitas whistleblowing system tidak semata ditentukan oleh keberadaannya secara formal, melainkan oleh sejauh mana karyawan percaya untuk

memanfaatkannya. Dengan kata lain, tingginya rata-rata pengungkapan WBS pada statistik deskriptif ternyata tidak serta-merta diterjemahkan menjadi pengaruh nyata terhadap pencegahan fraud, yang menyiratkan adanya kesenjangan antara keberadaan kebijakan di atas kertas dengan efektivitas pemanfaatannya di lapangan. Kekhawatiran terhadap risiko pembalasan (retaliation), lemahnya jaminan kerahasiaan identitas pelapor, serta sosialisasi yang bersifat seremonial dapat menghambat pemanfaatan sistem tersebut, sehingga dampaknya terhadap pencegahan fraud belum terlihat signifikan dalam periode pengamatan. Implikasinya, perusahaan perlu mengevaluasi bukan hanya kelengkapan pengungkapan whistleblowing system, tetapi juga tingkat kepercayaan dan partisipasi aktual karyawan terhadap sistem tersebut. Temuan ini konsisten dengan penelitian yang menekankan bahwa keberadaan whistleblowing system saja tidak cukup tanpa disertai efektivitas implementasi dan komitmen tindak lanjut manajemen (Winarno, 2015).

Pengaruh Teknologi Informasi terhadap Pencegahan Fraud

Teknologi informasi secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap pencegahan fraud (prob. 0,8103 > 0,05). Secara deskriptif, perusahaan dengan rasio pemanfaatan teknologi informasi di atas rata-rata ($> 0,012096707$) seluruhnya justru mengalami fraud (21,38% dari total sampel) tanpa satu pun yang bebas fraud, sedangkan kelompok di bawah rata-rata ($< 0,012096707$) mendominasi kejadian fraud sebesar 71,72%, dengan hanya 6,90% yang tidak mengalami fraud, sehingga tingkat pemanfaatan teknologi informasi yang lebih tinggi tidak serta-merta menurunkan kejadian fraud. Teknologi informasi pada dasarnya berperan sebagai enabling tools yang efektivitasnya bergantung pada bagaimana teknologi tersebut dikonfigurasi dan diintegrasikan dengan kebijakan pengendalian internal. Mengingat rata-rata rasio TI pada statistik deskriptif tergolong sangat rendah, hasil tidak signifikan ini turut mengindikasikan bahwa tingkat investasi teknologi informasi

berbasis software pada sebagian besar perusahaan sampel belum mencapai skala yang cukup untuk memberikan dampak nyata terhadap pencegahan fraud, sehingga variasi yang ada belum cukup besar untuk terdeteksi secara statistik. Investasi teknologi informasi bersifat strategis dan berjangka panjang, sehingga manfaatnya terhadap pencegahan fraud belum tentu terlihat signifikan dalam periode pengamatan yang relatif terbatas, terlebih apabila pemanfaatannya masih terbatas pada fungsi administratif dasar tanpa dioptimalkan untuk fungsi deteksi dini. Implikasinya, perusahaan perlu memastikan investasi teknologi informasi diarahkan secara spesifik pada fungsi analitik dan deteksi anomali transaksi, bukan sekadar digitalisasi proses administratif, agar dampaknya terhadap pencegahan fraud dapat terealisasi secara nyata (Ghozali, 2018).

Pengaruh Simultan terhadap Pencegahan Fraud

Secara simultan, rapat komite audit, etika karyawan, whistleblowing system, dan teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap pencegahan fraud (prob. 0,000000 < 0,05). Temuan ini menegaskan bahwa keempat variabel merupakan satu kesatuan sistem pengendalian yang saling melengkapi. Rapat komite audit berperan pada tingkat struktur tata kelola, etika karyawan menjadi fondasi perilaku individu, whistleblowing system berfungsi sebagai saluran deteksi dini, dan teknologi informasi memperkuat efektivitas seluruh mekanisme tersebut melalui otomatisasi dan transparansi data. Ketika keempat elemen diterapkan secara terintegrasi, perusahaan membangun multiple lines of defense terhadap potensi fraud, sehingga meskipun sebagian besar variabel tidak signifikan secara parsial, kombinasinya tetap memberikan pengaruh yang berarti terhadap pencegahan fraud secara keseluruhan. Implikasi paling penting dari pola hasil ini adalah bahwa strategi pencegahan fraud tidak dapat hanya bertumpu pada satu mekanisme unggulan, seperti etika karyawan semata, karena tanpa dukungan struktur pengawasan, saluran pelaporan, dan teknologi yang memadai,

sistem pertahanan terhadap fraud tetap akan memiliki celah pada level struktural yang tidak dapat diselesaikan oleh integritas individu saja (Gujarati & Porter, 2015; Winarno, 2015).

PENUTUP

Penelitian ini menguji pengaruh frekuensi rapat komite audit, etika karyawan, whistleblowing system, dan teknologi informasi terhadap pencegahan fraud pada 29 perusahaan sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI periode 2020-2024, dengan total 145 observasi, menggunakan regresi data panel Fixed Effect Model. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keempat variabel secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pencegahan fraud dengan kemampuan penjelasan sebesar 83,48%. Secara parsial, hanya etika karyawan yang terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan fraud, sedangkan frekuensi rapat komite audit, whistleblowing system, dan teknologi informasi secara parsial tidak berpengaruh signifikan. Temuan ini menegaskan bahwa kekuatan integritas individu memberikan kontribusi yang lebih nyata dibandingkan aspek kuantitas mekanisme pengawasan formal semata, meskipun keempat mekanisme tetap penting sebagai satu kesatuan sistem pencegahan fraud yang saling melengkapi.

Penelitian ini memiliki keterbatasan, antara lain penggunaan empat variabel independen yang belum mencakup seluruh faktor yang secara konseptual dapat memengaruhi pencegahan fraud, cakupan objek yang terbatas pada sub sektor makanan dan minuman, pengukuran frekuensi rapat komite audit yang hanya berbasis kuantitas tanpa mempertimbangkan kualitas substansi, serta penggunaan data sekunder dari pengungkapan laporan tahunan yang berpotensi belum sepenuhnya mencerminkan kondisi implementasi di lapangan. Berdasarkan keterbatasan tersebut, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengembangkan proksi pengukuran yang lebih spesifik, seperti kualitas agenda dan tindak lanjut rapat komite audit, indeks internalisasi etika berbasis survei, serta indeks forensic data analytics atau

keamanan siber untuk variabel teknologi informasi; menambahkan variabel lain seperti efektivitas audit internal, kepemilikan institusional, atau independensi dewan komisaris untuk memperbesar kemampuan model; memperluas cakupan periode dan objek penelitian ke sub sektor atau sektor lain; serta mempertimbangkan pendekatan mixed methods untuk menangkap faktor kontekstual yang tidak tertangkap data sekunder. Secara praktis, perusahaan disarankan meningkatkan kualitas substansi rapat komite audit, memperkuat program integritas dan etika karyawan secara berkelanjutan, membangun kepercayaan karyawan terhadap whistleblowing system melalui jaminan kerahasiaan dan tindak lanjut yang transparan, serta mengintegrasikan teknologi informasi secara menyeluruh dengan sistem pengendalian internal. Investor dan regulator disarankan turut memperhatikan indikator budaya etika dan integritas karyawan, tidak hanya kuantitas mekanisme formal, dalam menilai kualitas tata kelola dan kesiapan sistem anti-fraud perusahaan.

REFERENSI

- AFCE. (2025). 2025 Global Fraud Survey. <https://www.acfe.com/fraud-resources/global-fraud-survey>
- Akhyaar, K., Purwantini, A. H., Afif, N., & Prasetya, W. A. (2022). Pengendalian internal dan whistleblowing system terhadap pencegahan fraud pengelolaan dana desa. *Jurnal Riset Akuntansi*, 13(2), 202–217.
- Algrady, S. M., Huang, R., & Al-Matari, E. M. (2025). How do audit committee characteristics affect the quality of financial information? Evidence from Saudi Arabia and United Arab Emirates companies. *SAGE Open*. <https://doi.org/10.1177/21582440251317803>
- Amanda, D., & Kesuma, S. A. (2025). A systematic literature review on: Stewardship Theory (2020-2024). *International Journal of Social Science, Educational, Economics, Agriculture Research and Technology (IJSET)*, 4(12), 4290–4295.
- Attia, E. F., Diab, A., Hany, H., Eldeen, E., Abdou, H. A., & Hussein, A. (2025). Unravelling non-linear dynamics between audit committees and financial reporting quality in emerging markets. *Cogent Business & Management*, 12(1). <https://doi.org/10.1080/23311975.2025.2524045>
- Chang, Q., Kong, C., & Jin, S. (2024). Exploring the impact of digital transformation on corporate violations. Working Paper.
- COSO, & AFCE. (2023). Fraud risk management. Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission.
- Cressey, D. R. (1953). *Other people's money: A study in the social psychology of embezzlement*. Free Press.
- Creswell, J. W. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). SAGE Publications.
- Daffa, M., Syahputra, H., Anshari, R., & Pribadi, M. I. (2023). Dampak keahlian komite audit dan frekuensi rapat komite audit terhadap kualitas pelaporan keuangan di sektor infrastruktur. *Jurnal Akuntansi*, 8(2), 624–632.
- Donaldson, L., & Davis, J. H. (1991). Stewardship theory or agency theory: CEO governance and shareholder returns. *Australian Journal of Management*, 16(1), 49–64.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS* (9th ed.). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Girau, E. A., Habibah, A. K., Jomitin, B., Zainal Abidin, S., & Bujang, I. (2024). Combating corporate fraud through the lens of corporate governance in Malaysia. Working Paper.
- Gkegkas, M., Kydros, D., & Pazarskis, M. (2025). Using data analytics in financial statement fraud detection and prevention: A systematic review of methods, challenges, and future directions. Working Paper.
- Gujarati, D. N., & Porter, D. C. (2009). *Basic econometrics* (5th ed.). McGraw-Hill.
- Gujarati, D. N., & Porter, D. C. (2015). *Dasar-dasar ekonometrika* (5th ed.). Salemba Empat.
- IDX Industrial Classification. (2021). *Panduan IDX Industrial Classification* (1st ed.).
- Investor.id. (2025). Konsumsi rumah tangga tumbuh 4,94% pada tahun 2024, kendati daya beli tertekan. <https://investor.id/macroecconomy/388359>
- Irianti, L. R., & Nuswantara, D. A. (2025). *Journal of Business and Information Systems*, 7(1), 141–165.
- Jide, I., Abdurashed, B., & Leke, B. G. (2025). A contextual review of stewardship theory in corporate governance: Implications for business practices. *Premier Journal of Business and Management*, 3, 100010.
- Kagias, P., Garefalakis, A., Passas, I., & Kyriakogkonas, P. (2024). Whistleblowing based on the three lines model. Working Paper.
- Komisioner, D., & Jasa, O. (2015). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.04/2015 tentang keterbukaan atas informasi atau fakta material. Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia.

- Kusumosari, L., & Rahardjo, S. N. (2023). Audit committee effectiveness as fraud deterrence. *Diponegoro Journal of Accounting*, 8(2), 1602–1623.
- Linda, & Nurfauziah, F. L. (2025). The influence of internal control systems, whistleblowing systems, and organizational culture on fraud prevention at PT Triana Harvestindo Nusantara. *Journal of Accounting Research*, 8(2), 68–83.
- Mardessi, S. M. (2021). The effect of audit committee characteristics on financial reporting quality: The moderating role of audit quality. *Corporate Ownership & Control*, 18(3), 19–30. <https://doi.org/10.22495/cocv18i3art2>
- Masud, M. A. K., Sahara, J., Maola, M., & Rahman, M. (2024). Enhancing ESG performance through corporate governance: Insights from emerging markets. Working Paper.
- McLaughlin, C., Moustafa, M. W., & Elamer, A. A. (2021). Audit committee diversity and corporate scandals: Evidence from the UK. *Journal of Applied Accounting Research*, 29, 734–763.
- Nindito, M., Avianti, I., Koeswayo, P. S., & Dewi, N. (2020). The role of corporate governance in preventing fraud. Working Paper.
- Nyoman, N., Suryandari, A., Yadnyana, I. K., Ariyanto, D., & Erawati, N. M. A. (2023). Implementation of fraud triangle theory: A systematic literature review. *Journal of Governance & Regulation*, 12(3), 90–102. <https://doi.org/10.22495/jgrv12i3art10>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2022). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2022 tentang penyampaian laporan keuangan berkala emiten atau perusahaan publik. Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia.
- Periansya, P., Sari, Y., & Basyith, A. (2023). Whistleblowing, fraud prevention, and fraud awareness: Evidence from the Palembang Local Government of Indonesia. *Problems and Perspectives in Management*, 21(2). [https://doi.org/10.21511/ppm.21\(2\).2023.51](https://doi.org/10.21511/ppm.21(2).2023.51)
- Prastyawati, T., Anshari, R., & Priyadi, M. I. (2025). Peran frekuensi rapat komite audit dan independensi komite dalam meningkatkan kualitas pelaporan keuangan di sektor infrastruktur. *Jurnal Akuntansi*, 24(1), 26–41.
- Pratama, M. F., Karlina, R. R., Kusumadewi, A., & Ghozali, I. (2025). The influence of internal control system, whistleblowing system, and good corporate governance on fraud prevention: Empirical evidence from PT Bank Rakyat Indonesia, Sungai Penuh branch office. *International Journal of Business Studies*, 4(12), 6443–6456.
- PwC. (2022). PwC's global economic crime and fraud survey 2022. <https://www.pwc.com/gx/en/services/forensics/economic-crime-survey/2022.html>
- Ratmono, D., & Frendy. (2022). Examining the fraud diamond theory through ethical culture variables: A study of regional development banks in Indonesia. *Cogent Business & Management*, 9(1). <https://doi.org/10.1080/23311975.2022.2117161>
- Roffia, P., & Poffo, M. (2025). Revisiting the fraud triangle in corporate frauds: Towards a polygon of elements. Working Paper.
- Shanikat, M., & Aldabbas, M. M. (2025). Perception of corporate governance factors in mitigating financial statement fraud in emerging markets: Jordan experience. Working Paper.
- Shen, L., Zheng, K., & Luo, D. (2025). City digitalization and corporate financial fraud: An information asymmetry perspective. *Journal of Management Studies*. <https://doi.org/10.1111/joms.13197>
- Sudarmanto, E., & Utami, C. K. (2021). Pencegahan fraud dengan pengendalian internal dalam perspektif Alquran. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 7(1), 195–208.
- Tripermata, L., Wahyudi, T., & Fuadah, L. L. (2022). Whistleblowing intention and organizational ethical culture: Analysis of perceived behavioral control in Indonesia. *Journal of Accounting Research*, 13(1), 1–9.
- UU Nomor 8 Tahun 1995. (1995). Undang-Undang tentang Pasar Modal. Presiden Republik Indonesia.
- Winarno, W. W. (2015). Analisis ekonometrika dan statistika dengan Eviews (4th ed.). UPP STIM YKPN.
- Wooldridge, J. M. (2010). *Econometric analysis of cross section and panel data* (2nd ed.). MIT Press.

BIODATA PENULIS

Muhammad Hazwin Idris merupakan mahasiswa akuntansi Universitas Telkom.

Muhamad Muslih merupakan Dosen akuntansi di Universitas Telkom.